



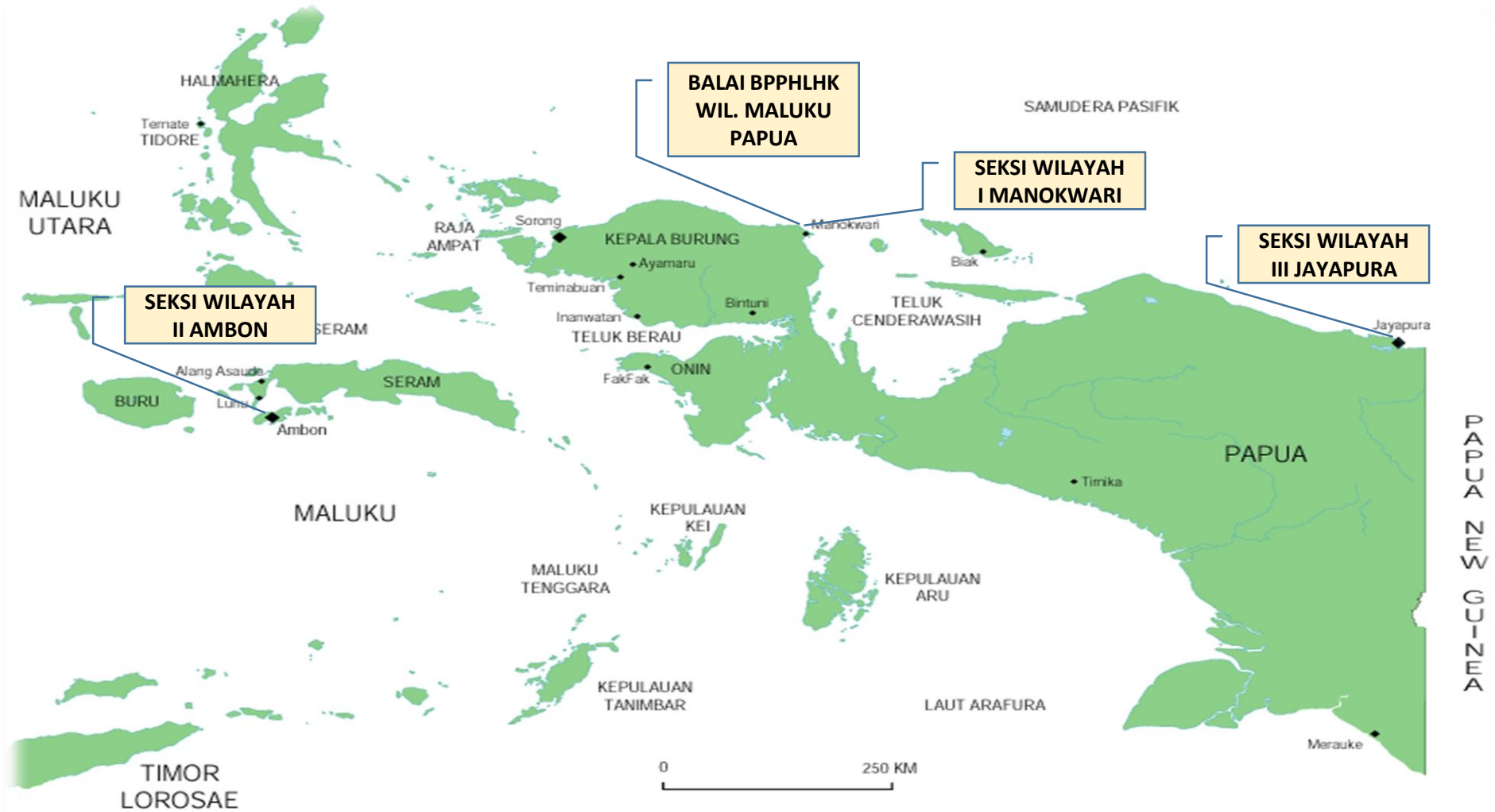
ANCAMAN DAN KERUSAKAN TERHADAP HUTAN DI WILAYAH MALUKU PAPUA

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK
WIILAYAH MALUKU PAPUA

JAYAPURA, 1 OKTOBER 2020



WILAYAH KERJA BALAI GAKKUM MALUKU PAPUA



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



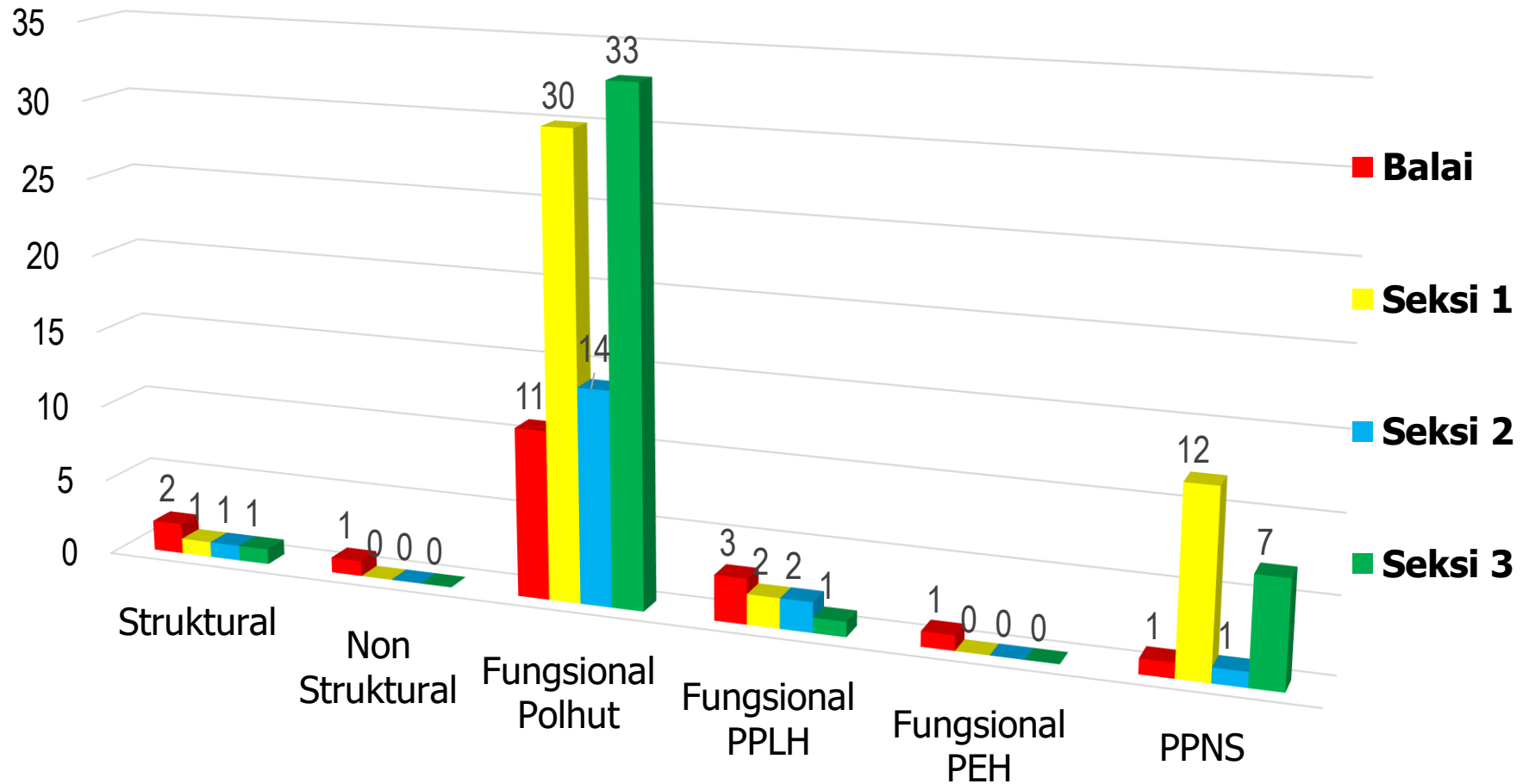
GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK



SEBARAN PERSONIL BALAI GAKKUM MALUKU PAPUA



KAWASAN HUTAN DI MALUKU DAN PAPUA

NO.	FUNGSI HUTAN	LUAS (Ha)			
		PAPUA	PAPUA BARAT	MALUKU	MALUKU UTARA
1	HL	7.815.283	1.627.679	627.256	584.058
2	HPK	4.116.365	1.472.700	1.324.866	564.082
3	HPT	5.961.240	1.777.437	894.258	666.851
4	HP	4.739.327	2.186.064	643.699	481.730
5	KSA & KPA	7.755.284	2.639.729	429.538	218.499
	JUMLAH	30,387,499	9.703.608	3.919.617	2.515.220



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan

Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan

PENGAMANAN

PENGAWASAN

PENYIDIKAN

- Melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum
- Melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan



KOMITMEN NASIONAL



“Penegakan hukum harus betul-betul dilakukan, baik administrasi, perdata atau pidana... Ini harus dilakukan agar menciptakan sebuah kepastian hukum dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.”

- Presiden Joko Widodo
(Sambutan pada Ratas Karhutla, 12 August 2016)



UU 5/1990
Konservasi SDA
Hayati &
Ekosistem



UU 41/1999
Kehutanan



UU 18/2008
Pengelolaan
Sampah



UU 32/2009
Perlindungan &
Pengelolaan LH



UU 18/2013
P3H



UU 37/2014
Konservasi
Tanah & Air



UU 8/2010
Pencegahan &
Pemberantasan TPPU



JENIS-JENIS KEJAHATAN LHK



PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEJAHATAN LUAR BIASA

AKTOR KEJAHATAN LHK



INDIVIDUAL



KORPORASI



KELOMPOK
TERORGANISASI



AKTOR
TRANSNASIONAL



ELIT POLITIK
BERPENGARUH



APARAT



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM_KLHK

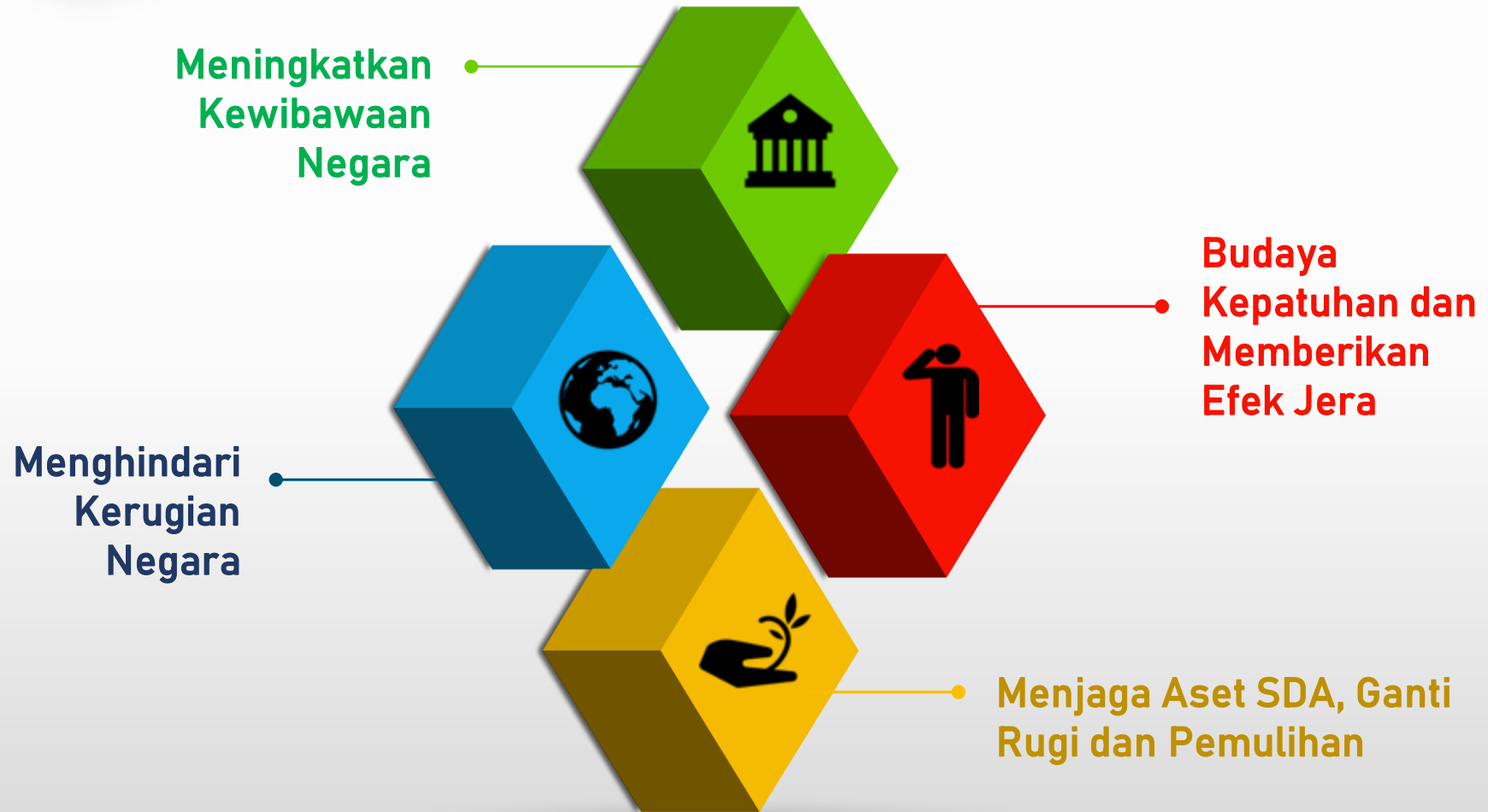


GAKKUMKLHK

FIGHT AGAINST
X-CRIME



TUJUAN PENEGAKAN HUKUM LHK



INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LHK



PENEGAKAN HUKUM
ADMINISTRATIF



PENEGAKAN HUKUM
PERDATA



PENEGAKAN HUKUM
PIDANA



DITJENKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK

FIGHT AGAINST
X-CRIME



PROSES PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF



Sanksi Administratif



Teguran Tertulis



Paksaan Pemerintah



Pembekuan Izin



Pencabutan Izin

PASAL 76 UU 32/2009

Sanksi administratif diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan



PASAL 77 UU 32/2009

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MENTERI terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang LHK



PROSES PENEGAKAN HUKUM PERDATA

PENYELESAIAN SENGKETA/PENEGAKAN HUKUM PERDATA



Menteri



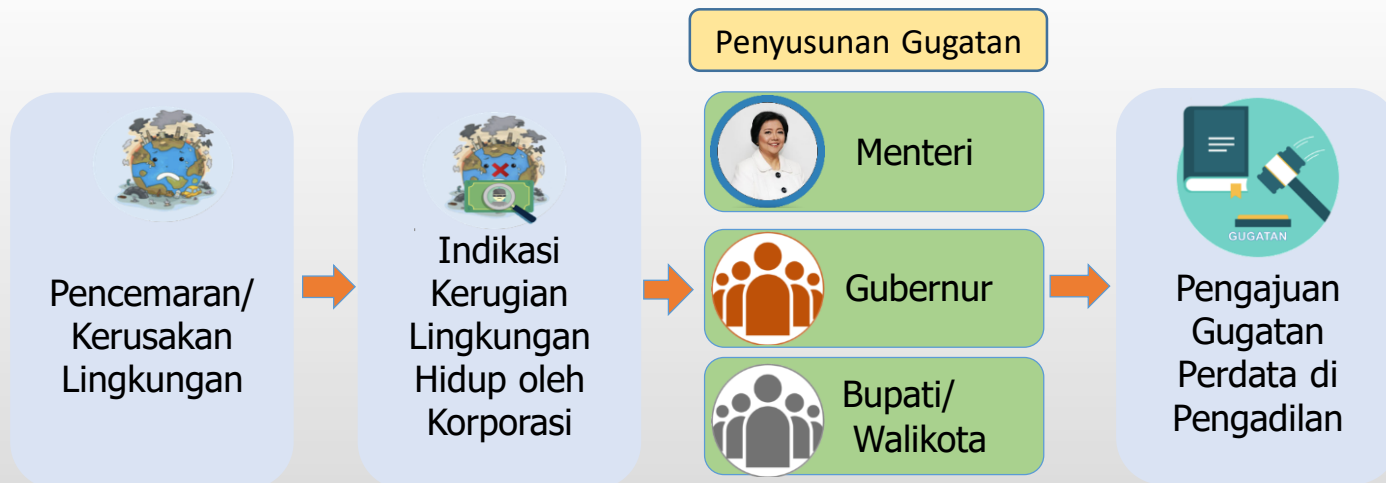
Gubernur



Bupati/Walikota

Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian Lingkungan Hidup.

(Pasal 90 UU 32/2009)

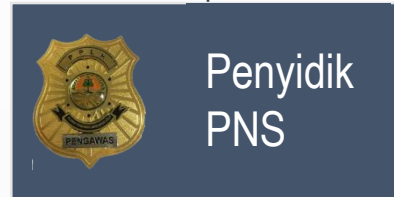




PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penyidik

Ps. 94 ayat (1) UU
32/2009



Kewenangan PPNS LHK Pasal 94 ayat (2) UU 32/2009

- 1) Memeriksa; dan/atau membuat rekaman audio visual;
- 2) Menyita;
- 3) Meminta bantuan ahli;
- 4) Menghentikan penyidikan;
- 5) Memasuki tempat tertentu, memotret,
- 6) Melakukan penggeledahan; dan/atau
- 7) Menangkap dan menahan.



LAPORAN KEJADIAN



PENYIDIKAN/SIDIK
OLEH PPNS LHK



PENELITIAN BERKAS



SIDANG

PULBAKET/LIDIK
OLEH PPNS LHK

BERKAS PERKARA
LENGKAP (P-21)



UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGAMANAN HUTAN DI BPPHLHK WIL MALUKU PAPUA



Intelijen



Operasi



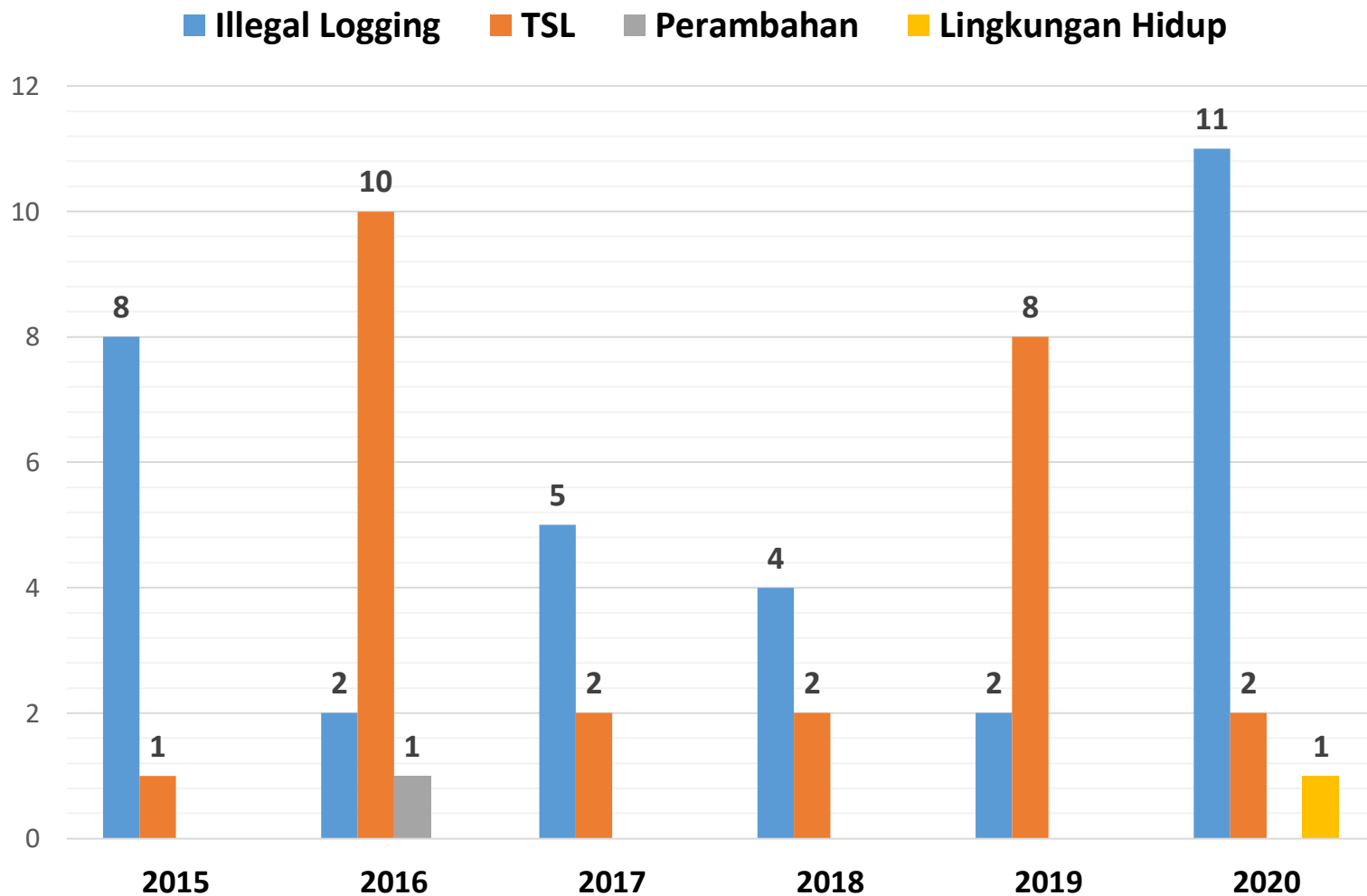
Penyidikan



PERMASALAHAN LHK DI MALUKU DAN PAPUA

ILLEGAL LOGGING		PENAMBANGAN ILLEGAL	
TERJADI HAMPIR DI SELURUH WILAYAH KERJA BALAI GAAKUM WIL. MALUKU PAPUA		TAMBANG EMAS ILLEGAL (NABIRE, JAYAPURA, YAHUKIMO) PEMODAL YG BESAR & MELIBATKAN MASYARAKAT BANYAK RIBUAN, BISNIS TRILYUNAN RUPIAH.	
MODUS PENCUCIAN KAYU MELIBATKAN MASY ADAT, IPKMA, KAYU NPL, KOPERMAS, PEMALSUAN DOKUMEN ANGKUT SIPUHH SKSHH KB/KO, PENYALAHGUNAAN IUIPHHK,		AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI SANGAT SULIT & PERLU BIAYA BESAR, KONDISI ALAM YANG EXTREME, JUMLAH PETUGAS TIDAK SEBANDING LUAS WILAYAH MENJADI KENDALA UTAMA.	
SINDIKAT LINTAS PULAU (PAPUA – MALUKU - SURABAYA – SEMARANG – TANGERANG – KALIMANTAN)		SINDIKAT MELIBATKAN OKNUM PENEGAK HUKUM & PEMERINTAH	
PEMODAL KELAS KAKAP & MELIBATKAN OKNUM APARAT/PEMERINTAH (BISNIS TRILYUNAN RUPIAH)		MELIBATKAN WNA & MENGGUNAKAN ALAT BERAT/CANGGIH.	
PERLAWANAN HUKUM KUAT (PRAPERADILAN & PENGACARA HUKUM KUAT)		PERLAWANAN HUKUM KUAT	
PERDAGANGAN ILLEGAL TSL			
JENIS BURUNG PARUH BENGKOK, PENYU, KERANG LOLA MERAH, REPTILE BAIK HIDUP MAUPUN BAGIAN-BAGIANNYA		MELIBATKAN JARINGAN INTERNASIONAL (PAPUA – KALIMANTAN - SULAWESI – PHILIPINA – CHINA –EROPA) PEMODAL BESAR & SINDIKAT SEL TERPUTUS	
LOKASI SULIT DIJANGKAU DAN DIDETEKSI, BERPINDAH-PINDAH. LOKASI TRANSAKSI DI TENGAH LAUT.			

PENANGANAN KASUS TAHUN 2015 - 2020



Ket: 8 (delapan) kasus sedang berjalan





LANGKAH-LANGKAH YANG DITEMPUH SAAT INI



MEMBENTUK SATGAS PENANGANAN ILLEGAL LOGGING DAN PERDAGANGAN BEBAS TSL BERSAMA POLRI, KPK, PPAK, KEJAGUNG DAN PENEGAK HUKUM LAINNYA

PENINGKATAN OPERASI PENGAMANAN DAN PENJAGAAN DI PINTU-PINTU KELUAR BANDARA DAN PELABUHAN LAUT

MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM SECARA SERIUS DAN TERUS MENERUS DENGAN MENINDAK TEGAS PARA PELAKU



Dokumentasi Penandatanganan MoU dengan KPK terkait Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam (Kehutanan dan Perkebunan)



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK



TERIMA KASIH



Alamat Pengaduan:



**BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LHK
WILAYAH MALUKU PAPUA**
Jl. Serma Suwandi, Komplek BLK
Sanggeng, Manokwari



bpplhk.maluku.papua@gmail.com



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK

**FIGHT
AGAINST
X-CRIME**